

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penggunaan strategic narrative dalam strategi diplomasi China untuk membangun reputasi internasional terkait isu Xinjiang, dapat disimpulkan bahwa China menggunakan berbagai instrumen diplomasi untuk membangun, menyampaikan, dan mempertahankan narasi mengenai dirinya serta kebijakannya di Xinjiang. Strategi tersebut dilakukan melalui diplomasi media, diplomasi publik, diplomasi ekonomi, diplomasi kontra-terorisme, serta penyampaian pernyataan resmi dalam forum internasional. Berbagai instrumen tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk menyampaikan perspektif China kepada aktor internasional.

Jika dianalisis menggunakan konsep strategic narrative Miskimmon, O'Loughlin, dan Roselle, strategi diplomasi China tersebut membentuk tiga jenis narasi yang saling berkaitan, yaitu system narrative, identity narrative, dan issue narrative. System narrative China menekankan pentingnya kedaulatan nasional, prinsip non-intervensi, serta penolakan terhadap penggunaan isu hak asasi manusia sebagai dasar intervensi terhadap urusan domestik suatu negara. Melalui narasi tersebut, China berupaya menempatkan persoalan Xinjiang dalam kerangka penghormatan terhadap kedaulatan dan tatanan internasional yang menekankan kesetaraan antarnegara.

Identity narrative digunakan China untuk membangun representasi mengenai dirinya sebagai negara yang bertanggung jawab, stabil, berorientasi pada

pembangunan, serta memiliki kapasitas untuk menangani persoalan domestiknya sendiri. Narasi tersebut disampaikan melalui berbagai komunikasi diplomatik, media resmi, white paper, kerja sama ekonomi, dan keterlibatan dalam forum internasional. China juga memproyeksikan dirinya sebagai mitra pembangunan bagi negara-negara berkembang dan sebagai aktor yang mendukung stabilitas serta kerja sama internasional.

Sementara itu, issue narrative digunakan untuk memberikan pemaknaan tertentu terhadap kebijakan China di Xinjiang. Pemerintah China membingkai kebijakan tersebut melalui isu kontra-terorisme, deradikalisasi, pendidikan vokasional, pembangunan ekonomi, stabilitas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan Xinjiang dipresentasikan oleh China sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan mendorong pembangunan, bukan semata-mata sebagai persoalan hak asasi manusia. Narasi tersebut disampaikan melalui white paper, media resmi pemerintah, pernyataan pejabat, diplomasi publik, serta forum internasional.

Namun, strategic narrative yang dibangun China tidak memperoleh respons internasional yang seragam. Data penelitian menunjukkan adanya perbedaan posisi di antara aktor internasional. Pada 2019, terdapat 22 negara yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan China di Xinjiang, sementara surat tandingan memperoleh dukungan awal dari 37 negara dan kemudian bertambah menjadi 50 negara. Pada 2022, perbedaan posisi tersebut kembali terlihat dalam pemungutan suara UNHRC mengenai usulan untuk mengadakan debat mengenai situasi HAM di Xinjiang. Dari

47 negara anggota, 17 negara mendukung, 19 negara menolak, dan 11 negara abstain.

Selain respons negara, terdapat pula perbedaan antara narasi resmi China dengan penilaian OHCHR. Laporan OHCHR tahun 2022 memberikan penilaian mengenai adanya dugaan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia di Xinjiang, sedangkan pemerintah China menolak penilaian tersebut dan mempertahankan narasi bahwa kebijakan di Xinjiang berkaitan dengan kontra-terorisme, stabilitas, pendidikan, dan pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pertemuan dan benturan antara narasi resmi China dengan counter-narrative yang berasal dari aktor internasional.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi diplomasi China terkait isu Xinjiang dapat dipahami sebagai proses konstruksi dan penyampaian strategic narrative melalui berbagai saluran diplomasi. Ketiga bentuk narasi, yaitu system narrative, identity narrative, dan issue narrative, digunakan secara saling berkaitan untuk menjelaskan posisi China, membentuk representasi identitas internasionalnya, serta memberikan pemaknaan terhadap isu Xinjiang. Pada saat yang sama, respons internasional terhadap narasi tersebut menunjukkan pola yang beragam berupa dukungan, kritik, dan abstain. Oleh karena itu, reputasi internasional dalam kasus ini tidak terbentuk secara sepihak melalui narasi yang disampaikan China, tetapi juga melalui proses interaksi dan kontestasi makna dengan aktor-aktor internasional lainnya.

4.2 Saran

Pertama, penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian mengenai strategic narrative dengan membandingkan narasi China dengan counter-narrative yang dibangun oleh aktor internasional lainnya. Perbandingan tersebut dapat dilakukan dengan melihat bagaimana negara, organisasi internasional, maupun organisasi masyarakat sipil membangun pemaknaan yang berbeda terhadap isu Xinjiang. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses kontestasi narasi dalam hubungan internasional.

Kedua, penelitian selanjutnya dapat memperluas periode penelitian agar dapat melihat perkembangan strategi komunikasi dan diplomasi China setelah 2022. Perubahan lingkungan informasi internasional, perkembangan media digital, serta perubahan dinamika hubungan China dengan negara-negara lain dapat memunculkan bentuk dan pola strategic narrative yang berbeda.

Ketiga, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan strategi strategic narrative China pada isu Xinjiang dengan penggunaannya pada isu internasional lainnya. Pendekatan tersebut dapat membantu melihat apakah pola system narrative, identity narrative, dan issue narrative yang ditemukan dalam penelitian ini juga muncul dalam isu lain yang berkaitan dengan kepentingan dan reputasi internasional China.

Keempat, penelitian selanjutnya dapat memperdalam analisis mengenai hubungan antara diplomasi ekonomi dan respons politik negara-negara mitra China. Penelitian ini menemukan adanya pola bahwa sejumlah negara yang memiliki

hubungan ekonomi yang erat dengan China juga muncul sebagai negara yang memberikan dukungan diplomatik terhadap posisi China. Namun, pola tersebut tidak secara langsung membuktikan hubungan sebab-akibat antara hubungan ekonomi dan posisi diplomatik. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan data yang lebih luas dan pendekatan yang lebih spesifik untuk mengkaji hubungan tersebut.

Kelima, bagi kajian Hubungan Internasional, penggunaan konsep *strategic narrative* dapat terus dikembangkan untuk memahami bagaimana negara membangun identitas, memberikan makna terhadap isu internasional, dan berkomunikasi dengan aktor lain dalam lingkungan internasional yang semakin dipengaruhi oleh media dan komunikasi digital. Penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan perspektif audiens untuk melihat tidak hanya bagaimana suatu narasi dibangun dan disampaikan, tetapi juga bagaimana narasi tersebut diterima, ditafsirkan, dan dinegosiasikan oleh berbagai aktor internasional.